

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 WATES

IMPL IMPLEMENTATION OF CULTURE-BASED EDUCATION IN 2 WATES OF HIGH SCHOOLS

Oleh: Tri Wahyuni, Universitas Negeri Yogyakarta
utri3006@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Implementasi pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 2 Wates; (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 2 Wates. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data model interaktif dari Milles dan Huberman. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian yaitu: (1) Implementasi pendidikan berbasis budaya: a) penerapan pada visi, misi, dan tujuan sekolah; b) penyesuaian pada kurikulum, RPP dan silabus mata pelajaran; c) pembiasaan budaya 5S dan berwawasan lingkungan; d) kegiatan sekolah: hari kartini, ulang tahun sekolah, ketoprak, unjuk karya, Kamis Pahing; pengadaan buku berwawasan budaya, dan perlombaan bidang seni; e) pengkondisian sarana prasarana dan lingkungan sekolah; f) kegiatan ekstrakurikuler; g) bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Kulon Progo. (2) Faktor pendukung: dukungan dinas, semangat dan komitmen yang tinggi dari warga sekolah, adanya program penunjang, dan tersedianya fasilitas memadai. Faktor penghambat: respon siswa yang kurang menunjukkan antusiasme, minat siswa berubah dan tingkat pemahaman masih rendah, serta kegiatan pendidikan berbasis budaya yang berbarengan dengan kegiatan lain.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pendidikan berbasis budaya, SMA Negeri 2 Wates

Abstract

This study aims to describe: (1) the implementation of culture-based education in SMA Negeri 2 Wates; (2) Supporting and inhibiting factors in the implementation of culture-based education at SMA Negeri 2 Wates. This research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Analysis of the interactive model data from Milles and Huberman. Test the validity of the data by triangulation of sources and techniques. The results of the research are: (1) Implementation of culture-based education: a) application of the vision, mission and goals of the school; b) adjustments to the curriculum, lesson plans and syllabus of subjects; c) 5S cultural habituation and environmental insight; d) school activities: Kartini's day, school anniversary, ketoprak, work shows, Thursday pahing; procurement of books with cultural insight, and competition in the arts; e) conditioning of school infrastructure and environment; f) extracurricular activities; g) cooperate with the Kulon Progo Cultural Office. (2) Supporting factors: official support, enthusiasm and high commitment from school members, the existence of supporting programs, and the availability of adequate facilities. Inhibiting factors: student responses that show less enthusiasm, changing student interest and low level of understanding, as well as cultural-based educational activities that coincide with other activities.

Keywords: policy implementation, culture-based education, SMA Negeri 2 Wates

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi memicu

timbulnya degradasi moral di kalangan pelajar yang menyebabkan hilangnya nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal ini ditandai

dengan terkikisnya nilai-nilai luhur budaya seperti sifat jujur, ramah tamah, gotong royong, saling menghormati, dan nilai-nilai positif lainnya sehingga menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan dalam dunia pendidikan. Seperti yang dimuat dalam dalam media online jogja.suara pada 22 November 2019 menyatakan bahwa di Yogyakarta, tepatnya Kabupaten Kulon Progo terdapat kasus penusukan seorang guru perempuan yang dilakukan oleh siswa karena berawal dari rasa kagum dan suka, akan tetapi tidak mampu mengelola dan mengendalikan emosi sehingga berujung anarkis (Sumber: <https://jogja.suara.com/read/2019/11/22/103915/murid-tusuk-guru-di-kulon-progo-dpr-krisis-moral>). Selain itu masuknya budaya asing yang tidak diserap dan diterima secara mentah juga mengakibatkan degradasi yang sangat luar biasa terhadap kebudayaan asli masyarakat Indonesia. Turunnya kesadaran masyarakat terhadap keberagaman budaya daerah secara perlahan dianggap kuno atau ketinggalan zaman. Berdasarkan surat kabar online yang dimuat dalam tribunews.com pada 27 Februari 2018 menyatakan bahwa eksistensi penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa daerah peninggalan leluhur mulai tersingkirkan. Faktor utamanya karena muncul anggapan bahwa bahasa Jawa terkesan ketinggalan zaman (Sumber: <https://jogja.tribunnews.com/amp/2018/02/>

[27/eksistensi-bahasa-jawa-kian-mengkhawatirkan-dan-bisa-terancam-punah](#)).

Pendidikan menjadi salah satu upaya memperkenalkan dan mengembangkan kebudayaan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana pendidikan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan manusia yang cerdas semata, tetapi juga membentuk manusia yang cinta terhadap budaya bangsa. Pendidikan merupakan proses transfer seluruh unsur kebudayaan dari pendidik kepada peserta didik. Tanpa proses pendidikan tidak mungkin kebudayaan itu berlangsung dan berkembang bahkan memperoleh dinamikanya (Tilaar 2000: 49).

Upaya yang dilakukan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempertahankan eksistensi keberagaman budaya Jawa adalah dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Perda DIY No. 5 Tahun 2011 dalam Bab I Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa:

“Pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan

keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia”.

Pendidikan berbasis budaya dilakukan untuk memperkenalkan kebudayaan yang diintegrasikan dengan diintegrasikan dengan menyisipkan dalam mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler, serta pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2025 Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga bertekad menjadikan sebagai pusat pendidikan terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.

Pada tahun 2014 telah dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora DIY No. 1980 tahun 2014 tentang penetapan sekolah model pendidikan berbasis budaya dalam rangka kegiatan pengembangan model pendidikan karakter berbasis budaya pada seksi perencanaan kependidikan bidang perencanaan dan standarisasi tahun 2014. Hal ini menjadi awal pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di Yogyakarta. Berdasarkan surat kabar online yang dimuat pada radarjogja.com pada 19 Desember 2016 menyatakan bahwa pengembangan

pendidikan berbasis budaya ada 100 sekolah yang menjadi sekolah model pendidikan berbasis budaya, dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK (Sumber:<https://radarjogja.jawapos.com/2016/12/19/sman-2-wates-sekolah-berbasis-budaya/>). Di Kabupaten Kulon Progo yang menjadi salah satu sekolah pelaksana pendidikan berbasis budaya di tingkat menengah atas adalah SMA Negeri 2 Wates.

SMA Negeri 2 Wates dalam melaksanakan kebijakan pendidikan berbasis budaya dilakukan melalui beberapa program sekolah. Sekolah telah memiliki fasilitas Laboratorium Seni dan Film sebagai penunjang program pendidikan berbasis budaya. Berbagai ekstrakurikuler yang mendukung sekolah berbasis budaya seperti karawitan, seni tari, dan seni lukis, batik dan sinematografi. Program rutin yang dilakukan di sekolah seperti unjuk karya, pembiasaan 5S (Senyum, Salam, Sapa Sopan, Santun) dan berwawasan lingkungan, Kamis Pahing, dan sebagainya. Kegiatan tidak hanya pada tingkat daerah maupun nasional, tetapi sudah pada tingkat internasional. Hal tersebut dapat dibuktikan tahun 2018 lalu, sekolah telah mengirimkan 8 (delapan) siswa ke Manila, Filipina dalam rangka memperkenalkan seni dan budaya Indonesia. Namun di samping itu, SMA Negeri 2 Wates dalam melaksanakan

pendidikan berbasis budaya juga terdapat permasalahan, yaitu belum ada tim pendidikan berbasis budaya, dan belum ada pedoman baku pelaksanaan pendidikan berbasis budaya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 2 Wates melalui penelitian yang berjudul “Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya di SMA Negeri 2 Wates”.

Implementasi menurut Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin (2005: 65) adalah memahami apa yang terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan adalah fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup usaha untuk mengadministrasikan atau menimbulkan dampak nyata dari masyarakat. Tilaar dan Nugroho (2008: 140) mengatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan di masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2005: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi,

yaitu: 1) Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. 2) sumber daya, baik manusia maupun sumber daya non-manusia. 3) Hubungan antar organisasi, yakni perlu koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 4) Karakteristik agen pelaksana adalah struktur organisasi dan pembagian tugas. 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik. 6) Disposisi implementor yakni: respon implementor terhadap kebijakan, kognisi, dan intensitas disposisi implementor.

Pengertian kebudayaan menurut Widagdhho (2008: 20), kebudayaan adalah hasil buah budi manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup. Segala sesuatu yang diciptakan manusia baik yang konkret maupun abstrak. Ki Hajar Dewantara dalam Tilaar (2000: 43) menegaskan bahwa budaya merupakan buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat yaitu alam dan zaman (kodrat dan masyarakat).

Proses pengenalan, pemeliharaan dan pengembangan wujud-wujud kebudayaan yang dilakukan ketika proses pendidikan dapat melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal (Tilaar 2000: 86). Pelaksanaan pendidikan formal merupakan pendidikan yang terstruktur dan terprogram, dalam penerapannya ditinjau berdasarkan tingkat, jenis, dan kurikulum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bodgan dan Tyler dalam Moelong (2014: 4) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis secara sistematis dan akurat mengenai gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian di suatu daerah tertentu.

Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di SMA Negeri 2 Wates yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasim Nomor 19, Padukuhan Sanggrahan Kidul, Kalurahan Bendungan, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 20 Januari – 27 Maret 2021.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian implementasi pendidikan berbasis budaya adalah kepala sekolah, pengampu kebijakan pendidikan berbasis budaya, guru kelas, guru ekstrakurikuler dan siswa. Teknik yang digunakan untuk memperoleh subjek penelitian adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2020: 95) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan strata, random atau daerah tetapi atas adanya tujuan tertentu.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian implementasi pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 2 Wates diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini proses pengumpulan data melalui teknik observasi partisipasi pasif. Wawancara dilakukan dengan teknik semi terstruktur kepada narasumber yakni kepala sekolah, pengampu kebijakan pendidikan berbasis budaya, guru kelas, guru ekstrakurikuler dan siswa. Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto, video, dan data-data di sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan berbasis budaya. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Menurut Sugiyono (2020: 101) dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono 2020 : 133). Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data,

kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan melakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 2 Wates dilaksanakan sejak dikeluarkannya SK Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Nomor 1980 Tahun 2014. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai pelaksana pendidikan berbasis budaya adalah SMA Negeri 2 Wates. Dalam pelaksanaannya SMA Negeri 2 Wates melaksanakan beberapa program tau kegiatan penunjang pendidikan berbasis budaya yakni:

a. Penerapan Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah

SMA Negeri 2 Wates dalam memaksimalkan kebijakan pendidikan berbasis budaya dituangkan dalam visi, misi, dan tujuan sekolah. Adanya visi sekolah tidak hanya bertujuan menciptakan siswa yang cerdas semata tetapi juga berbudaya dan berwawasan lingkungan. Visi yang dijabarkan dan

dibuat beberapa program dalam misi sekolah dilaksanakan untuk membentuk lulusan yang memiliki rasa kebangsaan yang kuat dengan berbasis kearifan lokal.

b. Penyesuaian pada kurikulum, RPP dan Silabus Mata Pelajaran

Pelaksanaan pendidikan berbasis budaya tidak hanya dilaksanakan melalui mata pelajaran seni atau bahasa Jawa, tetapi juga disesuaikan dengan mata pelajaran lainnya. Di setiap mata pelajaran disisipkan unsur budaya seperti budaya literasi, budaya sopan santun dan lainnya. Oleh karena itu unsur budaya terintegrasi di dalam semua mata pelajaran.

c. Pembiasaan sehari-hari

Warga SMA Negeri 2 Wates khususnya siswa dibiasakan pada hal-hal yang positif. Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa terhadap siswa. Penanaman nilai luhur budaya dicontohkan oleh guru, tenaga kependidikan, hingga karyawan kepada siswa melalui kegiatan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dan berwawasan lingkungan. Percontohan dan pembiasaan di SMA Negeri 2 Wates dilakukan setiap hari sehingga tertanam nilai-nilai luhur budaya pada diri setiap warga sekolah.

d. Kegiatan Sekolah

Sekolah dalam menerapkan pendidikan berbasis budaya dilakukan melalui program rutin dan program insidental. Kegiatan yang rutin diadakan adalah peringatan hari kartini, ulang tahun sekolah, ketoprak, unjuk karya atau pentas tari kolosal yang dilaksanakan oleh siswa kelas XII setiap akhir semester sebagai penilaian ujian praktik, penggunaan Bahasa Jawa krama alus dan pakaian adat Yogyakarta setiap Kamis Pahing. Kegiatan insidental yang dilaksanakan seperti pengadaan buku berwawasan budaya, dan perlombaan bidang seni.

e. Pengkondisian Sarana Prasarana Pendukung dan Lingkungan Sekolah Dukungan sarana prasarana dan lingkungan yang memadai menjadikan pelaksanaan kebijakan menjadi lebih maksimal. SMA Negeri 2 Wates dalam melaksanakan pendidikan berbasis budaya didukung oleh beberapa fasilitas sekolah seperti: joglo, laboratorium bahasa, perpustakaan, gamelan, kostum tari, *make up*, peralatan *shooting*, ruang membatik dan seni rupa, ruang tari, dan studio musik. Lingkungan sekolah yang mendukung yakni: penempelan tokoh wayang, penempelan slogan-slogan berkenaan dengan budaya, penamaan ruang kelas dan ruang lainnya dengan

nama tokoh wayang yang ditulis menggunakan tulisan aksara Jawa.

f. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung kebijakan pendidikan berbasis budaya seperti karawitan, seni tari dan rias, sinematografi, dan seni teater. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal yang telah dibentuk. Tempat pelaksanaan ekstrakurikuler dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah.

g. Bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Kulon Progo

SMA Negeri 2 Wates memiliki sanggar seni dan budaya yang dibentuk melalui akta legalitas no. 430/031/AKTE/LB-S/XII/2018 yang bernama Sanggar Pawitra Laras.

Menurut Wibawa dalam Hasbullah (2016: 92) implementasi kebijakan merupakan perwujudan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam undang-undang, namun dapat pula berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Sejauh mana implementasi pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 2 Wates dapat dilihat menggunakan enam aspek dari teori implementasi milik Van Horn dan Van Metter dalam Subarsono (2005: 99). Adapun enam aspek implementasi

pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri

2 Wates sebagai berikut:

a. Standar dan sasaran kebijakan

Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2005: 99) mengemukakan bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan menjadi multitafsir dan mudah menimbulkan konflik di antara para pelaksana kebijakan. Standar pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 2 Wates dengan memasukkan dalam visi misi sekolah yang terintegrasi dalam kurikulum, RPP, dan silabus mata pelajaran serta pembiasaan sehari-hari. Sedangkan tujuannya adalah sebagai pelaksana sekolah berbasis budaya, mencapai tujuan sekolah, serta menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah maupun internasional

b. Sumber daya

Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2005: 99) bahwa implementasi kebijakan perlu didukung oleh sumber daya manusia maupun non manusia. Menurut Edward dalam Hasbullah (2016: 99) dalam implementasi kebijakan diperlukan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Sumber daya non manusia

yang dimaksud adalah sumber daya finansial, alokasi waktu, dan sarana prasarana. Implementasi pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 2 Wates didukung oleh sumber daya manusia yang ada di sekolah, yaitu seluruh warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa.

Sumber daya finansial menjadi faktor penting setelah sumber daya manusia. Sumber daya finansial untuk menunjang kegiatan pendidikan berbasis budaya berasal dari dana BOS, APBD, Komite Sekolah, bantuan Dinas Kebudayaan Kulon Progo, dan Dinas Dikpora DIY.

Mengimplementasikan kebijakan secara sempurna memerlukan salah satu syarat yang harus terpenuhi yakni menyediakan waktu dan sumber daya yang memadai (Hogwood dan Gunn dalam Solichin (2008: 71)). Alokasi waktu berupa kegiatan rutin dan kegiatan insidental. Kegiatan rutin seperti pengintegrasian dalam mata pelajaran, pembiasaan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun) dan berwawasan lingkungan, piket jabat tangan setiap pagi, penggunaan bahasa Jawa krama alus dan pakaian adat Yogyakarta setiap Kamis Pahing, hari Kartini, unjuk karya, serta kegiatan ekstrakurikuler seni tari

dan rias, karawitan, sinematografi dan teater. Kegiatan insidental seperti HUT sekolah, pengadaan buku berwawasan budaya dan lomba bidang seni seperti FLS2N dan PPMBI.

Fasilitas penunjang pendidikan berbasis budaya yang dimiliki SMA Negeri 2 Wates terdapat joglo, laboratorium bahasa, perpustakaan, gamelan, kostum tari, *make up*, peralatan *shooting*, ruang membatik dan seni rupa, ruang tari, dan studio musik.

c. Karakteristik agen pelaksana

George C. Edward III dalam Hasbullah (2006: 99) menyatakan bahwa struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan pendidikan. SMA Negeri Wates belum memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas dalam kebijakan pendidikan berbasis budaya sehingga masih menyesuaikan struktur organisasi sekolah pada umumnya. Wakil kepala sekolah bertindak sebagai koordinator pelaksana kebijakan pendidikan berbasis budaya serta dibantu oleh guru seni dan guru Bahasa Jawa.

d. Hubungan antar organisasi

Hogwood dan Gunn dalam Solichin (2008: 71) mengemukakan bahwa salah satu syarat

mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna adalah dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik.

Koordinasi dan komunikasi dilakukan melalui rapat dinas, pembentukan panitia kecil pada kegiatan-kegiatan tertentu, dan komunikasi sehari-hari melalui aplikasi *WhatsApp*. Adapun kerja sama yang dijalin SMA Negeri 2 Wates dengan instansi lain adalah Dinas Dikpora DIY dan Dinas Kebudayaan Kulon Progo.

e. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Menurut Weimer dan Vining dalam Suharno (2003: 178) salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah dukungan lingkungan kebijakan dijalankan. Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2005: 99) menyebutkan bahwa variabel yang mendukung keberhasilan kebijakan terdiri dari: sumber daya ekonomi lingkungan, dukungan kelompok kepentingan, karakteristik partisipan, sifat opini publik, dan peran elite politik di dalamnya. Sumber daya ekonomi yang mendukung tertuang dalam RAPBS.

Kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat berasal dari Dinas Kebudayaan Kulon Progo dan Dinas Dikpora DIY, serta stasiun TVRI berupa pelaksanaan kegiatan-kegiatan

berbasis seni dan budaya. Van Horn dan Van Metter dalam Subarsono (2005: 99) karakteristik para partisipan dalam implementasi kebijakan berwujud mendukung atau menolak kebijakan. Karakteristik partisipan dibuktikan dengan antusiasme yang tinggi dari warga sekolah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan berbasis budaya. Seperti pada kegiatan unjuk karya, pembiasaan sehari-hari hingga penilaian spiritual dan sosial pada mata pelajaran PPkN dan agama.

Tanggapan masyarakat sekitar SMA Negeri 2 Wates dalam menanggapi dilaksanakannya pendidikan berbasis budaya adalah mendukung dan tahu bahwa sekolah menerapkan kebijakan tersebut. Beberapa kegiatan yang diadakan sekolah juga mengundang masyarakat sekitar seperti workshop *launching* sekolah berbasis budaya, sarasehan budaya, kenduri, pentas seni dan HUT sekolah.

Implementasi pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 2 Wates juga didukung oleh beberapa elite politik yang berasal dari alumni sekolah.

f. Disposisi implementor

Van Horn dan Van Metter dalam Subarsono (2005: 99) mengemukakan bahwa terdapat tiga hal penting dalam disposisi implementor yakni respons

implementor terhadap kebijakan, kognisi atau pemahamannya terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor. Seluruh warga sekolah adalah mendukung. Hal ini dilihat dari banyaknya antusias siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bidang seni karawitan, yang jumlahnya melebihi target sasaran sekolah.

Seluruh warga sekolah dan orang tua telah memahami bahwa SMA Negeri 2 Wates merupakan pelaksana pendidikan berbasis budaya. Setiap tahun ajaran baru dilakukan sosialisasi terkait pendidikan berbasis budaya melalui kegiatan MPLS kepada siswa baru dan orang tua.

Intensitas disposisi implementor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana intensitas warga sekolah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan berbasis budaya.

Menjalankan suatu kebijakan maupun program tentunya tidak terlepas dari dukungan dan hambatan. Menurut Rohman (2012: 115) salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah organisasi pelaksana atau sering disebut birokrasi pendidikan. dukungan dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY berwujud material maupun non material. Selain itu dukungan dan kerja sama dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo yang tertuang

dalam akta legalitas dalam pendirian sanggar seni dan budaya Pawitra Laras di SMA Negeri 2 Wates.

Menurut Rohman (2012: 115) faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah personil pelaksananya. Semangat dan komitmen warga sekolah yang tinggi untuk menjaga dan memelihara budaya sendiri.

Menurut Syukur dalam Hasbullah (2016: 104) salah satu unsur penting dalam proses implementasi kebijakan adalah adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan. Di SMA Negeri 2 Wates dalam menunjang pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis budaya terdapat beberapa program dijalankan yaitu program rutin dan program insidental.

Imron (2008: 76) menyatakan apabila salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi adalah sumber potensial yang tersedia. SMA Negeri 2 Wates terdapat fasilitas penunjang pelaksanaan pendidikan berbasis budaya yang cukup memadai.

Selain faktor pendukung, dalam melaksanakan kebijakan tentu tidak terlepas dari hambatan. Dalam pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 2 Wates, terdapat respon siswa yang kurang menunjukkan antusiasme dalam mengikuti kegiatan pendidikan berbasis budaya. Tidak semua siswa memiliki minat yang tinggi terhadap budaya serta tingkat

pemahaman terhadap budaya juga masih rendah. Seringkali kegiatan perlombaan dan latihan berbarengan dengan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan-kegiatan lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Bentuk dan pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 2 Wates: Bentuk dan pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 2 Wates yaitu: 1) Penerapan pada visi, misi, dan tujuan sekolah; 2) Penyesuaian pada kurikulum, RPP dan silabus mata pelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan unsur seni; 3) Pembiasaan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) dan berwawasan lingkungan ketika berada di sekolah, jabat tangan setiap pagi, dan lainnya. 4) Kegiatan sekolah meliputi hari kartini, ulang tahun sekolah, ketoprak, dan unjuk karya bagi siswa kelas XII sebagai sarana penilaian ujian praktik seni tari, kamis pahing, pengadaan buku berwawasan budaya, serta perlombaan bidang seni seperti FLS2N dan PPMBI. 5) Pengkondisian sarana prasarana pendukung dan lingkungan sekolah 6) Kegiatan ekstrakurikuler seperti karawitan, tari dan rias, sinematografi, teater. 7) Melakukan

kerja sama dengan Dinas Kebudayaan Kulon Progo.

Faktor pendukung yaitu 1) adanya dukungan dan kerja sama dari Dinas Dikpora DIY dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan kegiatan pendidikan berbasis budaya; 2) semangat dan komitmen yang tinggi warga sekolah dalam mengikuti kegiatan pendidikan berbasis budaya; 3) memiliki banyak pelaku seni dan yang peduli dengan seni; 4) adanya program/kegiatan penunjang pendidikan berbasis budaya; 5) tersedianya fasilitas penunjang pelaksanaan pendidikan berbasis budaya yang cukup memadai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah 1) respon siswa yang kurang menunjukkan sikap antusiasme; 2) minat siswa yang berubah-ubah dan tingkat pemahaman beberapa siswa terhadap kebudayaan masih rendah; 3) waktu pelaksanaan kegiatan/program pendidikan berbasis budaya berbarengan dengan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan lainnya.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan saran antara lain:

1. Sekolah perlu mengeluarkan regulasi kebijakan yang berfokus pada pelaksanaan pendidikan berbasis

budaya, mengingat di tahun 2014 SMA Negeri 2 Wates telah ditetapkan sebagai sekolah model pendidikan berbasis budaya dan belum memiliki dasar pelaksanaan kebijakan yang lebih jelas.

2. Perlu adanya pembentukan struktur organisasi pendidikan berbasis budaya di SMA Negeri 2 Wates sehingga proses pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif.
3. Mengingat karakter setiap siswa yang berbeda-beda, guru sebagai tenaga pendidik harus mampu melakukan pendekatan yang sesuai dengan siswa agar lebih mengenali dan memahami sehingga dapat membentuk karakter yang kuat bagi siswanya.
4. SMA Negeri 2 Wates perlu mengembangkan dan mengkreasikan program-program pendidikan berbasis budaya sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa dan memaksimalkan potensi dari siswa.
5. Perlunya SMA Negeri 2 Wates melakukan koordinasi untuk mengatur jadwal kegiatan-kegiatan pendidikan berbasis budaya sehingga bisa menyesuaikan agenda atau kegiatan sekolah yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbullah. (2016). Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, J. L. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pebriansyah, A. (2019). *Murid Tusuk Guru di Kulon Progo, DPR: Krisis Moral*. Diakses dari <https://jogja.suara.com/read/2019/11/22/103915/murid-tusuk-guru-di-kulon-progo-dpr-krisis-moral> pada tanggal 12 Maret 2020.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011.
- Ramadhan, A. (2018). *Eksistensi Bahasa Jawa Kian Mengkhawatirkan dan Bisa Terancam Punah*. Diakses dari <https://jogja.tribunnews.com/amp/2018/02/27/eksistensi-bahasa-jawa-kian-mengkhawatirkan-dan-bisa-terancam-punah> pada tanggal 11 November 2020.
- Solichin A. W. (2008). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. (2013). Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kebijakan Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Ombak.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar H.A.R. (2000). Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. (2008). Kebijakan Pendidikan Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utomo, H. (2016). SMAN 2 Wates Sekolah Berbasis Budaya. Diakses dari <https://radarjogja.jawapos.com/2016/12/19/sman-2-wates-sekolah-berbasis-budaya/> pada tanggal 10 Maret 2020. Pukul 01.20 WIB.
- Widagdho, D. (2010). Ilmu Budaya Dasar. Jakarta: Bumi Aksara.